

SABU-SABU DI LAPAS BANCEUY

Sindikatan dan Aparat Wajib Kena Sanksi

BANDUNG (SINDO) - Menyusul terbongkarnya sindikat sabu-sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy Bandung, Kriminolog & Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yesmil Anwar, menegaskan, jaringan pengedar narkoba antarlapas maupun luar lapas, wajib diberantas. Bukan hanya itu, aparat hukum dan HAM yang terlibat pun wajib dikenai sanksi. "Terbentuknya jaringan narkoba hingga melibatkan napi (narapidana) merupakan ke-

salahan akumulatif. Tidak mungkin napi memiliki keleluasaan bertransaksi narkoba, kalau tidak ada celah-celah yang memberinya peluang di dalam lingkungan lapas," tegas Yesmil kepada *SINDO*, saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM harus segera melakukan penyelidikan dengan adanya jaringan pengedar sabu-sabu di Lapas



YESMIL ANWAR

Banceuy. Pengedar sabu-sabu itu diduga dilakukan oleh terpidana Joni Pohan (JP), berkat penelusuran aparat Polsekta Bojongloa Kaler. Seperti diberitakan sebelumnya, JP diketahui menjadi penyuplai sabu-sabu, setelah jajaran Reskrim Polsekta Bojongloa Kaler mendapat bocoran dari tersangka kasus narkoba bernama

Yongki yang ditangkapnya. Dari mulut Yongki diketahui, dia mendapat barang haram berupa sabu-sabu itu dari JP, untuk selanjutnya akan dijual kepada kalangan mahasiswa di Bandung. JP sendiri mendapat rekomendasi untuk menjual sabu-sabu kepada Yongki, dari napi narkoba Rutan Cipinang Jakarta, bernama Gendut.

Selanjutnya, langkah penyelidikan itu harus pula melibatkan aparat kepolisian.

Terlebih jaringan narkoba tersebut dibongkar oleh jajaran kepolisian. Dia menegaskan, pada kasus Banceuy ini tidak ada alasan bagi Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk menolak langkah penyelidikan. Bahkan, jajaran inspektorat tersebut harus mendapatkan sanksi, baik hukuman pidana atau sanksi administratif atas terjadinya transaksi narkoba di Lapas Banceuy. "Mengaku tidak tahu pun, inspektorat tetap harus kena sanksi, karena pihaknya sudah melakukan kelalaian sehingga transaksi narkoba itu terjadi di rutan (rumah tahanan) binaannya," ung-

kap Yesmil.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Dedi Sutardi mengaku tidak tahu-menahu soal sindikat narkoba di Lapas Banceuy. "Saya belum tahu tentang hal itu, dan belum ada laporan yang diserahkan kepada saya. Bahkan napinya pun saya belum tahu. Namun, kami berjanji akan melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai terbongkarnya jaringan narkoba di Lapas Banceuy ini," aku Dedi, saat dihubungi *SINDO*.

Selanjutnya, Yesmil menambahkan akar permasalahan terjadinya kasus peredaran narkoba termasuk kasus lainnya, seperti keru-

suhan, homoseksual, serta kasus lainnya di rutan merupakan kasus umum yang juga terjadi di banyak negara. Hal itu disebabkan banyak faktor. Menurut dia, sarana dan prasarana rutan yang buruk bisa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, kekurangan anggaran untuk pengelolaan rutan dan kurangnya gaji pegawai pun bisa mendorong kasus-kasus tersebut terjadi. Faktor lain yang cukup penting adalah tidak profesionalnya kinerja aparat hukum dan HAM.

"Aparat atau petugas yang tidak profesional karena gajinya kurang umpamanya, akan mengangap *kongkalikong* dengannya sebagai kerja sampingan. Apalagi napi

sindikat narkoba itu punya kepentingan bisnis, maka berapa *pun* biayanya akan dia keluarkan untuk melancarkan bisnisnya," tutur Yesmil.

Walaupun urusan kesejahteraan merupakan alasan klasik yang sering dijadikan kambing hitam atas melorotnya profesionalisme kinerja, tetapi hal itu tidak harus berimbas pada persoalan penegakan hukum. "Jangan sampai lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, malah menjadi tempat pembinasaan. Makanya, arah pengusutan kasus juga seharusnya tidak hanya difokuskan pada pelaku (sindikat pengedar narkoba) saja, tetapi difokuskan

juga kepada petugas lapasnya," tegas Yesmil.

Menurutnya, bila terbukti terjadi kelalaian atau ditemukan adanya petugas lapas yang terlibat, maka petugas itu harus mendapat hukuman berat. "Pelaku pengedar itu mau mengendalikan bisnisnya dengan apa di dalam lapas, kalau dia tidak mempunyai perangkat penunjang seperti *hand phone* atau paling tidak kurir yang menyampaikan informasi sekaligus membawa barang haramnya. Hal itu *kan* yang menjadi objek utama pengawasan para petugas lapas. Tapi kenapa kasus itu mesti terjadi," tegas Yesmil.

(atep abdiillah kurniawan)